

## Analisis Pengembangan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam

Debby Puspita Sari<sup>1</sup>, U. Sulia Sukmawati<sup>2</sup>, Gustina<sup>3</sup>

IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: debbypuspitasari2017@gmail.com

IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: uray\_suliasukmawati@yahoo.com

IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: [gustinasbs@gmail.com](mailto:gustinasbs@gmail.com)

### Histori Naskah

Diserahkan:  
02-10-2023

Direvisi:  
12-02-2024

Diterima:  
15-02-2024

### Keywords

: Developing Village Index; village development, Islamic development economics

### ABSTRACT

*This research is motivated by Village Development and Development in Parit Raja Village, Sejangkung District, seen from the level of Village independence as measured based on the Village Development Index (IDM). This research aims to analyze the concept of village development from an Islamic economic development perspective. The theory used in this research is Ibn Khaldun's Development Economic Theory. This research uses a qualitative research approach which is field research in nature and tends to use analysis which emphasizes process and meaning. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data source used is primary. Research data analysis techniques are data reduction, data presentation, drawing conclusions. Based on the results of this research, it is concluded that Parit Raja Village has implemented the concept of Islamic development economics which consists of 5 variables including state, institutions, human beings, wealth, and justice and development.*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembangunan dan pengembangan Desa di Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dilihat dari tingkat kemandirian desa yang diukur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengembangan desa perspektif ekonomi pembangunan Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Ekonomi Pembangunan Ibnu Khaldun. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat *field research* dan cenderung menggunakan analisis dimana lebih menonjolkan proses dan makna. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu primer. Teknik analisis data penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa Desa Parit Raja sudah menerapkan konsep ekonomi pembangunan Islam yang terdiri dari 5 variabel di antaranya negara (*state*), institusi (*institutions*), sumber daya insani (*human beings*), kekayaan (*wealth*), dan keadilan (*justice*) dan pembangunan (*development*).

### Kata Kunci

: Indeks Desa Membangun; pengembangan desa, ekonomi pembangunan Islam

### Corresponding Author

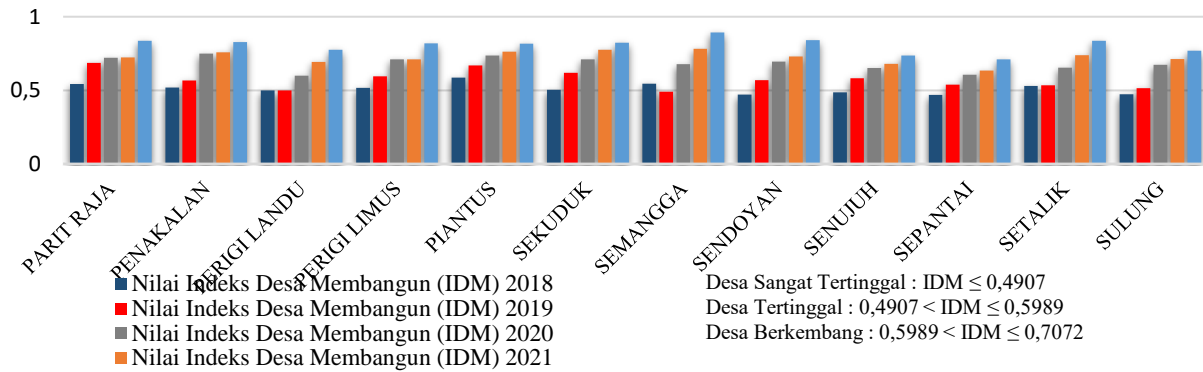
: Debby Puspita Sari, e-mail: debbypuspitasari2017@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting. Pembangunan desa bisa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Pemerintah Pusat, 2014). Dalam proses perencanaan pembangunan desa, data menjadi salah satu sumber yang utama dalam proses penentuan prioritas di desa, seperti data SDGS, data Indeks Desa Membangun, potensi desa, data Rembug Stunting dan data pendukung lainnya. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Ketiga Indeks Komposit tersebut dijadikan referensi di dalam proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan sebuah desa (K. D. Indonesia Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2016). Perangkat indikator dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa (Stit et al., 2018).

Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam status desa mandiri. Peningkatan status desa mandiri tidak terpisahkan dari peranan dana desa. Dana desa memberikan kesempatan kepada desa-desa untuk mengembangkan desa mereka melalui program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Pada tahun 2018, Kalimantan Barat hanya memiliki 1 desa mandiri dari 2.031 total desa yang ada. Berdasarkan hasil verifikasi Indeks Desa Membangun pada tahun 2022, jumlah desa mandiri di Kalimantan Barat meningkat menjadi 586 desa. Berdasarkan data Kemendes PDTT, Kabupaten Sambas paling banyak menyumbangkan desa mandiri di Kalimantan Barat (Bappeda Sambas, personal communication, Agustus 2022). Hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam memberikan masukan kepada desa dalam proses input data Indeks Desa Membangun sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kabupaten Sambas menurut data peningkatan desa mandiri tahun 2019 memiliki 8 desa mandiri, 29 desa maju, 108 desa berkembang, 45 desa tertinggal dan 3 desa sangat tertinggal (W. Abdi, personal communication, July 4, 2022). Sedangkan pada tahun 2022 Kabupaten Sambas tercatat memiliki sebanyak 191 Desa Mandiri, 64 Desa Maju dan 10 Desa Berkembang, yang jauh meningkat dari pada tahun sebelumnya (Bappeda Sambas, personal communication, Agustus 2022). Pada tahun 2022 Kecamatan Sejangkung merupakan penyumbang terbanyak desa mandiri di Kabupaten Sambas, yang mana terdapat 8 Desa Mandiri, dan 4 Desa Maju. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan Pemerintah Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat dalam mendongkrak skor Indeks Desa Membangun (IDM) (W. Abdi, personal communication, July 4, 2022). Berikut ini peningkatan Desa Mandiri yang ada di Kecamatan Sejangkung dari tahun 2018-2022.



Gambar 1. Indeks Desa Membangun Per/Desa di Kecamatan Sejangkung Tahun 2018-2022 (Kemendesa, 2023)

Penelitian dengan topik pengembangan desa perspektif ekonomi pembangunan Islam telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian sejauh ini dilakukan berkaitan dengan pengembangan desa perspektif ekonomi Islam dengan ruang lingkup potensi wisata (Titi, 2023). Ada juga penelitian yang mengkaji efektifitas pengelolaan anggaran dana desa perspektif Islam (Firayanti, 2023; Sambas et al., 2023). Ada juga yang mengkaji peran masyarakat dalam pembangunan desa perspektif Islam (Mutiara et al., 2018). Penelitian yang mengkaji konsep pembangunan desa perspektif Islam dengan konsep Ibnu Khaldun masih belum dilakukan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM) serta pengembangan yang ada di Desa yang dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan dengan potensi yang ada di Desa. Sejalan dengan itu, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian: bagaimana konsep pengembangan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung perspektif ekonomi pembangunan Islam? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran adanya koneksi antara konsep Islam dan implementasi pengembangan desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *field research*. Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Desember 2022. Data yang terkumpul selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2012). Penelitian yang bersifat *field research* lebih menekankan pada kenyataan yang akan menghasilkan suatu kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari suatu penelitian yang dibuat oleh peneliti. Penelitian ini menyajikan karakteristik sesungguhnya dari fenomena yang terjadi di lapangan. *Setting* penelitian dilakukan di Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan analisis bergaya induktif dengan mengklasifikasikan data (Afrizal, 2016), mereduksi, menyajikan, dan melakukan penarikan kesimpulan/verifikasi hasil temuan (Miles & Huberman, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Pengembangan Desa

Dalam Undang-Undang Desa, dinyatakan bahwa “Desa adalah suatu kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan

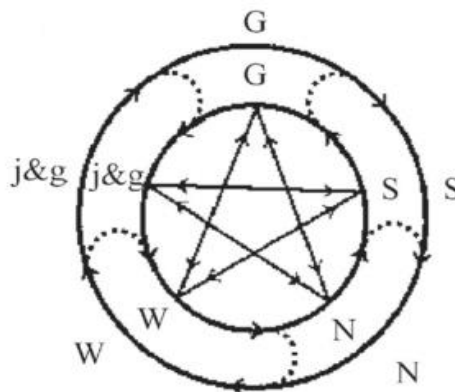
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia” (Pemerintah Pusat, 2014). Desa bukan hanya dianggap sebagai salah satu objek dari pembangunan melainkan menjadi sebuah subjek dan ujung tombak dari pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (K. K. Indonesia, 2017). Desa adalah lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat karena berada di susunan lapisan Pemerintahan yang paling bawah dalam tata Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan desa adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kemandirian di suatu desa melalui berbagai langkah dan strategi (Soleh, 2017). Tujuan dari pengembangan desa adalah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidupnya, mengoptimalkan potensi yang ada serta mengatasi permasalahan yang menghambat pembangunan Desa (Pitono & Kartiwi, 2016). Pengembangan desa dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan penguatan kelembagaan, dan perbaikan infrastruktur (Onnoa et al., 2021). Jalan, jembatan, irigasi, dan listrik adalah beberapa contoh infrastruktur yang perlu dibangun.

Indikator pengembangan desa merupakan seperangkat ukuran yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan desa. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pengembangan desa salah satunya seperti Indeks Desa Membangun (IDM), perkembangan ekonomi Desa. Pembangunan yang ada di Desa bukan hanya tanggung jawab aparat pemerintah saja, tetapi perlu melibatkan seluruh anggota masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, serta petugas yang memantau jalannya partisipasi.

**B. Konsep Ekonomi Pembangunan Islam**

Ekonomi merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Ekonom dan pemikir muslim telah berkontribusi dalam proses Islamisasi ekonomi dengan menyadari kebutuhan untuk mengintegrasikan pengetahuan Islam dengan ekonomi karena kontribusinya yang signifikan terhadap fondasi ekonomi Islam. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai "bapak ekonomi Islam". Dalam konsep ekonomi Ibnu Khaldun, dinyatakan bahwa norma (syariah), administrasi, populasi, kekayaan, pembangunan, dan keadilan semuanya dapat saling memengaruhi, baik secara positif maupun negatif (Hofmann, 2002).



Gambar 2. Model Pembangunan Ibnu Khaldun (Mahri et al., 2021)

Secara matematis, model ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  $G = f(S, N, W, j \text{ dan } g)$ . G mengacu pada variabel negara/pemerintah (*the state*), S mengacu pada variabel Institusi (*Institutions*), N merupakan sumber daya insani (*Human Beings*), W merupakan kekayaan (*Wealth*), J menunjukkan keadilan (*justice*), dan g menunjukkan pembangunan (*development*)

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah (G) tidak dapat diwujudkan melainkan dengan implementasi syariah (S). Syariah (S) tidak dapat diwujudkan selain oleh pemerintah/negara (G). Pemerintah (G) tidak akan mendapatkan kekuasaan kecuali oleh masyarakat (N). Pemerintah (G) yang kokoh tidak akan terwujud tanpa adanya ekonomi yang tangguh. Masyarakat (N) tidak dapat terwujud selain dengan adanya kekayaan. Kekayaan tidak dapat terwujud kecuali dengan adanya pembangunan (D). Pembangunan (D) juga tidak akan dapat tercapai kecuali dengan keadilan (J). Penguasa/pemerintah (G) selalu bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan (J). Keadilan (J) merupakan timbangan yang akan dievaluasi oleh Allah (Ridwan et al., 2023). Berikut penjelasan secara lengkap mengenai pengaruh suatu faktor dan hubungannya dengan faktor lain.

1. Negara (*The State*)

Ibnu Khaldun menekankan bahwa setiap orang yang memegang kedaulatan harus memiliki semua sifat kebaikan yang dituntut oleh agama. Politik harus bersifat toleran, moderat, dan adil, juga harus menghindari sifat yang licik, curang, dan kepalsuan. Konsep Negara yang digagas oleh Ibnu Khaldun adalah sebuah negara yang menjamin berlakunya syariah dan berfungsi sebagai instrumen bagi pembangunan manusia dan kesejahteraannya (Ridwan et al., 2023). Negara juga harus menjamin hak-hak masyarakat dan bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat sejahtera/makmur melalui pembangunan yang adil (Huda, 2015).

2. Institusi (*Institutions*)

Ibnu Khaldun memaknai syariah sebagai hukum ilahi mengenai perintah melakukan hal yang baik dan melarang melakukan hal yang merusak. Kebaikan tersebut dapat membantu proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerjasama, perdamaian, dan kerukunan sosial, serta pengendalian perilaku yang dapat merugikan masyarakat. Syariah mengacu pada nilai-nilai dan lembaga atau aturan perilaku yang membuat masyarakat bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap sesama dan mencegah perilaku sosial yang menyimpang (Hofmann, 2002; Ridwan et al., 2023).

3. Sumber daya insani (*Human Beings*)

Kemajuan dan kemunduran suatu peradaban sebagian besar dipengaruhi oleh kesengsaraan dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, Ibnu Khaldun memberikan penekanan yang signifikan pada peran manusia dalam analisisnya. Kesejahteraan bagi manusia merupakan tujuan pembangunan. Kehendak manusia dapat berfungsi secara efektif dan kreatif ketika kesejahteraan terpenuhi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia suatu bangsa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besarnya potensi pertumbuhan ekonominya. Akibatnya, perhatian harus diberikan pada pengembangan sumber daya manusia karena pembangunan manusia memiliki dampak signifikan terhadap pemberantasan kemiskinan.

4. Kekayaan (*Wealth*)

Kekayaan menyiapkan sumber daya yang sangat diperlukan untuk menjamin keadilan dan pembangunan. Kekayaan bergantung kepada aktivitas ekonomi, luasnya pasar, insentif, dan fasilitas yang diberikan oleh negara kepada rakyat, yang pada hakikatnya bergantung pada tabungan atau “kelebihan sesudah pemenuhan kebutuhan masyarakat”. Tarif pajak yang rendah, jaminan hidup, hak milik, dan lingkungan fisik yang sehat adalah faktor-faktor yang menjadi katalisator. Pemerintah dapat membelanjakan lebih banyak untuk kesejahteraan rakyat apabila pendapatan naik. Hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Ketika pendapatan menurun, begitu pula pendapatan pajak.

## 5. Pembangunan (*development*) dan Keadilan (*Justice*)

Tanpa unsur keadilan, pembangunan tidak dapat terjadi. Masalah keadilan tidak dilihat dalam konteks ekonomi yang sempit melainkan dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, komunitas yang *welas asih* diperlukan untuk pencapaian keadilan holistik yang komprehensif (Mahri et al., 2021). Ibnu Khaldun menegaskan bahwa keadilan merupakan ciri khas dari kehidupan Islam dan masyarakat, dan sebagai bagian tak terpisahkan dari hukum, sosial dan kemajuan ekonomi. Selain itu, Islam menekankan bahwa keadilan tidak hanya berakar dalam sistem masyarakat tetapi juga harus beresonansi melalui semua tingkat kehidupan sosial dalam semua hubungan dan urusan, mulai dari pribadi, keluarga, kelompok, hingga negara (Tohir, 2014).

## C. Pengembangan Desa Parit Raja Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam

### 1. Negara (*state*)

Desa merupakan subsistem dari pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Upaya pemerintah desa untuk memaksimalkan kemandirian desa ialah dengan memiliki akses dan fasilitas yang lengkap baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun pelayanan sehingga memudahkan masyarakat Parit Raja untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikannya. Selanjutnya Pemerintah Desa tidak mempersulit pembuatan surat keterangan usaha untuk masyarakat meminjam uang di bank/KUR (Rajimin, personal communication, September 15, 2022).

### 2. Institusi (*Institution*)

Syariah sebagai hukum ilahi perintah melakukan yang baik dan melarang melakukan apa yang jahat dan merusak. Oleh karena itu, semua itu menurunnya syariah untuk kebaikan manusia dan melayani kepentingan mereka. Sifat dasar ketuhanan dalam diri manusia membawa mereka meningkatkan potensi kesediaan untuk saling membantu dan kepatuhan terhadap syariah dan kesediaannya untuk menjadi agen persatuan antar kelompok sehingga tetap bersatu kuat.

Kerja sama pembangunan di Desa Parit Raja berbentuk himbuan dan kesepakatan yang dibuat pada saat musyawarah. Contohnya kerjasama untuk pembangunan yang bersifat swadaya. Selain itu, pemerintah desa juga bertindak transparan mengenai realisasi pembangunan, misalnya dengan memasang spanduk realisasi pembangunan, poster kawasan tanpa rokok, dan poster antikorupsi (Rajimin, personal communication, September 15, 2022).

Pembangunan yang ada di Desa Parit Raja bersifat transparan. Setiap kegiatan yang diselenggarakan dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang kemudian dilaporkan minimal 2 kali dalam setahun. Contohnya spanduk tentang laporan pertanggungjawaban dan spanduk realisasi APBDes. Dikarenakan Desa Parit Raja sudah mandiri maka Dana Desa keluar setiap 2 kali dalam setahun. Penyaluran tahap pertama dana Desa sebesar 60% dan penyaluran tahap kedua 40%. Sedangkan Desa yang belum mandiri penyalurannya tahap pertama 40%, tahap kedua 20%, dan tahap ketiga 40%. Semuanya dilaksanakan secara transparan (Rajimin, personal communication, September 15, 2022).

### 3. Sumber daya insani (*human beings*)

Manusia memiliki peranan penting dalam dinamika peradaban. Manusia adalah tujuan dan alat pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan, kesejahteraan ditujukan bagi manusia. Ketika kesejahteraan telah terpenuhi maka manusia akan dapat bekerja secara efektif dan kreatif. Prioritas Pembangunan di Desa Parit Raja dilakukan tidak sesuai keinginan aparat pemerintah, namun mempertimbangkan mana yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat. Ini misalnya perbaikan jalan menuju sawah yang rusak, masalah stunting di kesehatan, masalah PKBM dan lain-lain. Masyarakat ikut serta dalam musyawarah dengan petunjuk sesuai aturan Desa, tidak mengabaikan prioritas dana Desa sehingga tidak menjadi masalah pada masa mendatang. Sudah beberapa tahun ini, Dana Desa disediakan untuk BLT. Pemerintah mengupayakan ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama. Dalam pembangunan di Desa, tetap ada anggaran untuk padat karya tunai yang mana masyarakat mendapatkan upah langsung (Lita, personal communication, Oktober 2022).

Perencanaan RPJMDes dan RKPDes, dan penentuan usulan Desa menerapkan konsep *bottom up*, yang artinya usulan berasal dari masyarakat bukan dari BPD maupun Pemdes. Masyarakat yang mengusulkan di dalam musyawarah, masyarakat yang menentukan prioritas usulan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Di dalam musyawarah semua lapisan masyarakat dilibatkan termasuk masyarakat miskin, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan lembaga Desa serta pemuda yg ada di Desa (Rajimin, personal communication, September 15, 2022).

Pemerintah Desa Parit Raja mengadakan kegiatan dalam memberdayakan masyarakatnya contohnya PKK. Di dalam anggaran APBDes, pemerintah desa bersama masyarakat dan BPD sepakat untuk membuat kegiatan yang akan dilaksanakan PKK Desa seperti membuat kebun toga dan kegiatan lainnya yang dibuat PKK. Desa membuat kegiatan sekolah lapang, sebagai ajang untuk belajar warga dan warga diharapkan dapat membuat perencanaan dalam penanaman padi dengan baik sehingga warga desa tidak kekurangan sumber pangan (Rajimin, personal communication, September 15, 2022).

Selain itu, disampaikan juga oleh Kepala Desa Desa Parit raja bahwa pihak desa juga telah membentuk BUMDes dalam usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat. BUMDes diharapkan dapat meningkatkan UMKM di Desa agar dapat berkembang pesat (Rajimin, personal communication, September 15, 2022). Sebagaimana kita ketahui bahwa Desa Parit Raja merupakan desa penghasil kerajinan di Kecamatan Sejangkung. Beberapa pengembangan potensi masyarakat lainnya yaitu dengan mengadakan pelatihan anyaman bambu untuk UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Semua tergantung usulan dari masyarakat. Contohnya pelatihan yang sudah diselenggarakan adalah pelatihan membuat souvenir dari batang pisang, buat hantaran pernikahan yang terbuat dari bambu (Lita, personal communication, Oktober 2022).

### 4. Kekayaan (*Wealth*)

Kekayaan dalam kehidupan merupakan hal yang penting kerana menyediakan sasaran target utama yang diperlukan untuk memastikan keadilan dan pembangunan berjalan dengan baik, memacu efektifitas pelaksanaan aturan-aturan oleh pemerintah, dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi kekayaan di Desa Parit Raja ialah ada pasar. Pertama, pasar lama di dekat penyeberangan dan yang kedua pasar rakyat. Pasar rakyat yang baru masih belum diresmikan tapi sudah bisa beraktivitas untuk berjualan. Namun, pemungutan retribusi masih belum dapat dilakukan.

Retribusinya masuk ke PAD pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas. Pasar rakyat sudah banyak yang menempatnya. Di situ telah berjalan berbagai usaha seperti warung makanan dan minuman, perabotan rumah tangga, dan pakaian (Lita, personal communication, Oktober 2022).

Potensi di Desa Parit Raja sebenarnya amat besar. Dari segi pertambangan di Desa Parit Raja ada galian c (pasir). Di bidang pertanian, Desa Parit Raja menghasilkan kerajinan yang dapat ditampilkan di pasar dan dikembangkan oleh BUMDes (Rajimin, personal communication, September 15, 2022). Selain itu, potensi masyarakat yang ada di Desa Parit Raja adalah keterampilan untuk menghasilkan kerajinan dari bambu, rotan (Mawardi, personal communication, Oktober 2022). Pemasaran kerajinan bambu dilaksanakan melalui distributor yang mengambil langsung ke rumah warga. Permintaan terhadap produk kerajinan bambu cukup tinggi, akan tetapi pengrajin bambu di Desa Parit Raja sedikit sehingga mengakibatkan pengrajin tidak dapat memenuhi permintaan. Produk yang dihasilkan berupa *capel*, *ragak* dan tempat buah yang terbuat dari bambu. Kerajinan yang dibuat masyarakat didistribusikan bukan hanya di Kabupaten Sambas saja akan tetapi sampai ke Pontianak dan Negara Malaysia (Lita, personal communication, Oktober 2022; Mawardi, personal communication, Oktober 2022).

##### 5. Pembangunan (*development*) dan Keadilan

Pembangunan tidak selalu mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang hanya mementingkan pembangunan secara fisik saja. Namun pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang terintegrasi yang meliputi aspek rohani dan jasmani yang bersifat Universal untuk tujuan mencapai kebahagiaan dan kemakmuran manusia di dunia dan akhirat. Dalam menyelenggarakan pembangunan, pemerintah desa fokus pada apa yang belum ada di Desa yang bisa mendongkrak nilai skor Indeks Desa Membangun. Pemerintah mengupayakan jalur evakuasi, PKBM, kegiatan kursus dan bagaimana penduduk dapat menggunakan fasilitas pembiayaan. Skor pada akses lainnya sudah mrencukupi, hanya saja perlu ditingkatkan lagi terutama pada akses ekonomi di bidang pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menganggarkan program sekolah lapang yaitu sekolah yang dikhususkan untuk para petani/gapoktan tentang bagaimana pengolahan tanah, penggunaan bibit, pupuk untuk meningkatkan hasil produksi. Untuk tahun 2022, pemerintah menyiapkan demplot di setiap dusun sebagai contoh kepada masyarakat tentang bagaimana pengolahan sawah modern yang bertujuan mengubah pemikiran masyarakat yang sebelumnya menanam padi secara tradisional menjadi modern (Rajimin, personal communication, September 15, 2022).

Selain itu, dampak pembangunan desa terlihat dan dinikmati oleh masyarakat misalnya akses jalan tani. Sebelumnya, akses jalan petani ke sawah tidak memadai, tapi saat ini aksesnya mudah bahkan menggunakan kendaraan. Pengembangan di desa ini juga memiliki dampak positif di bidang kesehatan, pertanian, dan pendidikan walaupun tidak sepenuhnya memiliki perubahan yang signifikan (Rajimin, personal communication, September 15, 2022).

Namun, sebenarnya pembangunan yang ada di Desa Parit Raja belum merata, baik dari segi akses jalan dan listrik. Sampai sekarang masih ada daerah yang belum memiliki listrik tepatnya di ujung Dusun Rambayan. Akses jalan menuju Dusun Seladu masih terbilang sempit, hanya 1,2 meter. Di Dusun Seladu terdapat sebuah sekolah negeri yang tidak memiliki akses listrik. Pada saat covid-19, banyak anak – anak yang kesulitan untuk mengerjakan tugas sekolah. Pemerintah Desa sudah berupaya mengajukan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan, tetapi belum berhasil. Hal ini



menunjukkan perlunya perhatian dari pemerintah agar setiap warga mendapatkan keadilan untuk mendapatkan fasilitas listrik dalam menunjang kehidupan masyarakat di Dusun Seladu agar anak – anak dapat belajar dengan baik (Rajimin, personal communication, September 15, 2022).

Namun, upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan yang ada di Desa dilakukan secara adil dan seimbang, serta tidak membedakan bagi tiap-tiap dusun “besar sama besar, kecil sama kecil”. Di Dusun Seladu yang sampai saat ini belum terdapat jaringan listrik bukan berarti pemerintah desa tidak berupaya. Pemasangan jaringan sudah sering diajukan, tapi belum ada respon dari pemerintah tentang kepastian untuk mendapatkan listrik. Padahal, jaringan listrik amat diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah dan penerangan rumah warga, dan jalan. Pemerintah desa sudah mengusahakan beberapa tindakan untuk mencari solusi ketidakmerataan pembangunan tersebut di antaranya dengan mengajukan pemasangan jaringan listrik, akan tetapi belum mendapatkan respon

Dalam menyelenggarakan program pembangunan di Desa Parit Raja Pemerintah Desa sudah berusaha sebaik mungkin. Jika ditelaah berdasarkan model Ibnu Khaldun, tampak bahwa hampir semua variabel yang terdiri dari negara, institusi, sumber daya insani, kekayaan, pembangunan, dan keadilan sudah optimal dilakukan oleh Pemerintah setempat. Dalam menjalankan tugas sebagai pemerintah desa, kepala desa selalu transparan mengenai penggunaan dana desa yang sudah dikeluarkan. Hal ini terbukti dengan adanya spanduk realisasi APBDes.

Pembangunan diselenggarakan dengan pendekatan *battom up*. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan sumber daya insani. Begitu banyak program yang sudah dilakukan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat dengan mempertimbangkan anggaran desa. Setiap program yang dilakukan yang telah direncanakan dan dirumuskan, sebagian besar dilakukan oleh masyarakat Desa Parit Raja.

Dari aspek kekayaan, Desa Parit Raja memiliki potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang belum terlalu dikembangkan. Desa Parit Raja memiliki tambang pasir dan pertanian. Apabila maksimal mengembangkan potensi ini, akan dapat meningkatkan PAD. Desa Parit Raja memiliki masyarakat yang terampil sebagai pengrajin yang sangat bagus jika dikembangkan. Hasil dari kerajinan masyarakat ini sudah dikenal di beberapa wilayah bahkan sudah diekspor ke negara tetangga.

Dari beberapa variabel model Ibnu Khaldun, hal yang belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu dalam pembangunan fisik di Desa tersebut. Walaupun Desa Parit Raja sudah menjadi Desa Mandiri, akan tetapi ada dusun di Desa tersebut yang belum mendapatkan pemerataan pembangunan seperti infrastrukturnya yang kurang memadai dan belum mendapatkan aliran listrik yang merata.

## **PENUTUP**

Konsep ekonomi pembangunan Islam menurut Ibnu Khaldun terdiri dari beberapa variabel yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pembangunan di antaranya negara (*state*), institusi (*institutions*), sumber daya insani (*human beings*), kekayaan (*wealth*), keadilan (*justice*), pembangunan (*development*). Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Desa Parit Raja sudah menerapkan konsep ekonomi pembangunan Islam model Ibnu Khaldun yang terdiri dari negara, institusi, sumber daya insani, dan kekayaan. Akan tetapi dalam aspek keadilan pembangunan, pembangunan di desa tersebut belum merata yang ditandai dengan infrastruktur yang kurang memadai.

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan. Adapun keterbatasan dari penelitian ini tidak menyajikan anggaran dana desa yang merupakan akar dari pembangunan Desa. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif dari variabel-variabel yang dijadikan pisau analisis. Untuk itu, peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengukur variabel-variabel konsep pembangunan Ibnu Khaldun beserta penyusunan indikatornya dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini diharapkan menjadi pemrakarsa penelitian mendatang dengan topik penyusunan indikator keberhasilan pembangunan desa perspektif Ibnu Khaldun.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdi, W. (2022, July 4). *Data Desa Mandiri tahun 2019* [Langsung Tatap Muka].
- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Bappeda Sambas. (2022, Agustus). *Desa Mandiri di Kalimantan Barat* [Langsung Tatap Muka].
- Firayanti, S. (2023). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA SIDOHARJO KECAMATAN JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN). *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), Article 1.
- Hofmann, M. W. (2002). The Future of Economics: An Islamic Perspective. By Umer Chapra. *Intellectual Discourse*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.31436/id.v10i1.321>
- Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Kencana.
- Indonesia, K. D., Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/150585/permendes-pdtt-no-2-tahun-2016>
- Indonesia, K. K. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. [https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/Buku-Saku-Dana-Desa-ttd-menteri-final-cover\\_opt.pdf](https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/Buku-Saku-Dana-Desa-ttd-menteri-final-cover_opt.pdf)
- Kemendesa. (2023). *IDM: Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>
- Lita. (2022, Oktober). *Partisipasi Masyarakat di Desa Parit Raja* [Langsung Tatap Muka].
- Mahri, J. W., Cupian, Arif, M. N. R. A., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarok, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (1st ed.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mawardi. (2022, Oktober). *Potensi Masyarakat di Desa Parit Raja* [Langsung Tatap Muka].
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mutiara, N., Mursinto, D., & Maliki, Z. (2018). Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam. *WADIAH*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v2i2.2995>
- Onnoa, R., Ruru, J., & Londa, V. (2021). PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MUSI SATU KECAMATAN KALONGAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(106), Article 106. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/34890>
- Pemerintah Pusat. (2014). *UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Pitono, A., & Kartiwi. (2016). PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat. *JURNAL POLITIKOLOGI*, 3(1), 27–37.
- Rajimin. (2022, September 15). *Pengembangan Desa Parit Raja* [Langsung Tatap Muka].
- Ridwan, M., Ghofur, A., Rokhmadi, R., & Pratama, G. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8247>

- Sambas, Y., Sudiarti, S., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pematang Sei Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Tahun 2018 – 2020). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), Article 5. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2836>
- Soleh, A. (2017). STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DESA. *Jurnal Sungkai*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.30606/js.v5i1.1181>
- Stit, M., Kusuma, N., & Purwanti, E. (2018). Village Index Analysis Building to Know The Village Development In Gadingrejo District of Pringsewu District. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 6(02), Article 02.
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Titi, H. (2023). *DINAMIKA PENGEMBANGAN DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM* [Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <http://repository.radenintan.ac.id/29451/>
- Tohir, M. (2014). *Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, IBN Khaldun, dan M.Umer Chapra*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30286>